

PENGARUH KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN TINGKAT
PEMBIAYAAN SILPA TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Akuntansi FE UNP*



Oleh :

SRI MULYANI
2020/20043154

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

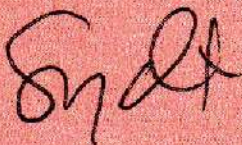
**Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap
Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021)**

Nama : Sri Mulyani
NIM/TM : 20043154/2020
Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 18 November 2022

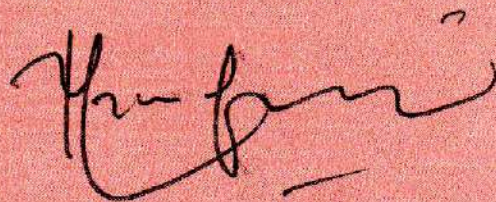
Disetujui Oleh :

Ketua Jurusan



Sanv Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Halkadri Fitra, SE, MM, Ak
NIP. 19870515 201012 2 009

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

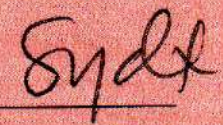
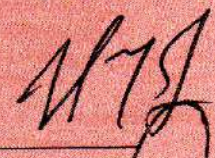
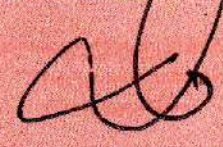
**Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap
Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
(Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021)**

Nama : Sri Mulyani
NIM/TM : 20043154/2020
Program Studi: Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan Tim Penguji Ujian Skripsi Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

Padang, 18 November 2022

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D	1. 
2.	Anggota	Nayang Helmayunita, SE, M.Sc	2. 
3.	Anggota	Dr. Deviani, SE, Ak, M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Sri Mulyani
TM/NIM	: 2020/20043154
Tempat/Tanggal Lahir	: Solok/18 Agustus 1997
Program Studi	: Akuntansi S1
Keahlian	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi
Alamat	: Komplek Andalas Makmur, Kota Padang
Judul Skripsi	: Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Pembiayaan SILPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis (skripsi) saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang atau di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang berlaku pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, November 2022



Sri Mulyani

ABSTRAK

Mulyani, S. (20043154/2022) : Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Sumatera Barat (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2016-2021)

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM.A.k

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh kemandirian keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA dapat mempengaruhi alokasi belanja modal pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan jangka waktu 6 tahun. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Kata kunci : Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Pembiayaan SiLPA; Alokasi Belanja Modal

ABSTRACT

Mulyani, S. (20043154/2022) : The Effect of Regional Financial Independence and SiLPA Financing Level on Capital Expenditure Allocation in West Sumatra Regional Government (Empirical Study on Districts/Cities in West Sumatra 2016-2021)

Pembimbing : Halkadri Fitra, SE, MM.A.k

This study aims to determine the extent to which the influence of regional financial independence and of the level of SiLPA financing can affect the capital expenditure allocation of district/city governments in West Sumatra. The population in this study is the Regency/City in West Sumatra in 2016-2021. This study uses secondary data. The sampling technique used purposive sampling technique with a sample of 19 districts/cities in West Sumatra with a period of 6 years. Data analysis used multiple linear regression analysis. The results showed that of regional financial independence and of the level of SiLPA financing have no effect on the allocation of capital expenditures.

Keywords: Regional Financial Independence, SiLPA Financing Level; Capital Expenditure Allocation

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2021)”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM.A.k selaku dosen pembimbing dan pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Nayang Helmayunita, SE, M.Sc, selaku dosen penelaah yang telah memberikan banyak saran dan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Dr.Deviani, SE, M.Si, Ak selaku dosen penguji yang telah memberikan banyak saran dan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

6. Ibu Vita Fitria Sari, SE, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (PA).
7. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Mama, Ayah, dan keluarga yang selalu memberikan motivasi, perhatian, nasihat, doa'a, dan kekuatan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat terbaik SUBEDU yang selalu mendampingi penulis dalam suka dan duka selama kuliah dari awal semester hingga saat ini.
10. Keluarga Akuntansi yang telah berjuang bersama dan selalu memberikan bantuan serta semangat kepada penulis.
11. Teman terbaik Rahma, lilik, resti, kintan, kak nadia dan Abram yang telah sama-sama berjuang dari awal perskripsian hingga saat ini. Thanks guys
12. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan, bimbingan, petunjuk, dan kerja sama yang diberikan tidak sia-sia dikemudian hari dan semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penulis meminta maaf atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritikan positif dari banyak pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Padang, November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN TEORI, PENGEMBANGAN HIPOTESIS, DAN KERANGKA KONSEPTUAL	12
A. Landasan Teori	12
1. Teori Stewardship (Stewardship Theory)	12
2. Kinerja Keuangan daerah	14
3. Analisis Rasio Keuangan	16
4. Belanja Modal	26
B. Penelitian yang Relevan	29
C. Pengembangan Hipotesis	36
D. Kerangka Konseptual	39
E. Hipotesis Penelitian	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Populasi dan Metode Pengambilan Sampel	41

C. Jenis dan Sumber Data Penelitian	43
D. Metode Pengumpulan Data	44
E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	44
F. Model dan Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	54
B. Deskriptif Variabel Penelitian	55
C. Analisis Deskriptif	59
D. Penentuan Model Estimasi antara <i>Common Effect Model</i> (CEM) dan <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) dengan Uji Chow	61
E. Penentuan Model Estimasi antara <i>Fixed Effect Model</i> (FEM) dan <i>Random Effect Model</i> (REM) dengan uji Hausman	62
F. Uji Kelayakan Model Penelitian	63
G. Hasil Pengujian Hipotesis	65
H. Analisis Regresi Data Panel	66
I. Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	67
J. Uji Hipotesis Penelitian	67
K. Pembahasan	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Keterbatasan	76
C. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1.1 Rasio Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat	4
1.1 Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah	23
1.2 Penelitian yang Relevan	30
2.1 Nama-nama Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	42
3.1 Perhitungan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	56
3.2 Pengukuran Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021	57
3.3 Pengukuran Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021	59
3.4 Statistik Deskriptif	60
3.5 Hasil dari Uji Chow	61
3.6 Hasil dari Uji Hausman	62
3.7 Uji Multikolinieritas	64
3.8 Uji Heteroskedastisitas	65
3.9 Fixed Effect Model	65
4.10 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R ²)	67
4.11 Uji F	68

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Hal
2.1 Kerangka Pemikiran	37
4.1 Hasil Pengujian Normalitas	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah pusat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah daerah memiliki pelimpahan wewenang dengan cakupan yang luas dalam mengurus daerahnya sendiri dan meminimalkan peran yang berlebihan dari pemerintah pusat. Dalam pelimpahan wewenang tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang ketat. Oleh karena itu dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, otonomi daerah dikatakan sebagai bentuk hak, wewenang, dan kewajiban suatu daerah otonomi untuk mengatur dan mengendalikan kepentingan pemerintahan dan masyarakat daerah tersebut dalam satu kesatuan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan penyerahan otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harapannya setiap daerah mampu meningkatkan pelayanan di berbagai sektor, terutama sektor publik.

Kesuksesan organisasi sektor publik memberikan paradigma baru terhadap anggaran daerah yaitu bahwa anggaran daerah harus bertumpu pada kepentingan umum, yang dikelola dengan memberikan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pasal 55 Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas pengeluaran daerah atau belanja daerah dibagi menjadi empat diantaranya belanja operasi, belanja modal,

belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja modal adalah pengeluaran yang bertujuan untuk pengalokasian aset tetap yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal digunakan untuk menambah aset tetap daerah seperti pembangunan infrastruktur, dan aset tetap lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat daerah. Pengalokasian belanja modal yang besar dapat didukung dengan mengoptimalkan pendapatan daerah yang dibagi menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah.

Anggaran belanja modal diperoleh dari dana pendapatan daerah, namun dana tersebut tidak hanya dialokasikan untuk belanja modal tetapi juga dialokasikan untuk belanja daerah lainnya. Berdasarkan penelitiannya, Felix (2012) menyatakan bahwa alokasi belanja daerah lebih banyak dialokasikan untuk belanja rutin (belanja barang dan jasa) dan belanja pegawai yang manfaatnya kurang produktif bagi pelayanan publik karena pengeluaran tersebut hanya dinikmati oleh pejabat daerah. Sisanya, hanya sebagian kecil yang digunakan untuk belanja modal. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus lebih bijak dalam mengalokasikan belanja daerah khususnya dalam alokasi belanja modal (Nugraha & Dwirandra, 2016).

Dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi diperlukan kefokuskan pemerintah terhadap permasalahan yang muncul terkait dengan penerapan belanja modal adalah upaya peningkatan kinerja keuangan daerah yang tidak berjalan secara optimal. Artinya kinerja keuangan daerah memerlukan faktor pendukung terutama dalam realisasi belanja daerah terhadap belanja modal.

Apabila kinerja keuangan daerah tidak berjalan secara optimal maka akan berdampak kepada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Jika kinerja keuangan daerah dapat berjalan secara optimal maka dapat menjelaskan eksistensi pemerintah daerah sebagai suatu lembaga yang dipercaya dapat menampung aspirasi masyarakat, dapat memberikan pelayanan yang baik bagi publik, dan mampu membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi terpenuhi serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Hal ini sejalan dengan teori stewardship yang dibangun berdasarkan sifat manusia yaitu dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas, serta dapat berlaku jujur untuk pihak lainnya.

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan guna meningkatkan perekonomian. Untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di Sumatera Barat, peran dari pemerintah sangat diperlukan. Berbagai kebijakan dibuat guna untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita daerah, karena dari kenaikan tersebut dapat dilihat tambahan pendapatan dan adanya perbaikan dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat (Arsyad, 2015). Untuk mewujudkan hal ini tentunya menuntut Pemerintah Daerah untuk memberikan fasilitas untuk investasi melalui alokasi belanja yang lebih besar untuk belanja modal (pembangunan).

Menurut Fakhry (2017) porsi alokasi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal dicerminkan melalui rasio belanja modal.

Tabel 1.1 Rasio Belanja Modal Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021

No	Kab/Kota	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata
1	Kabupaten lima puluh kota	21%	21%	21%	14%	13%	18%
2	Kabupaten Agam	22%	17%	21%	11%	12%	17%
3	Kabupaten kepulauan Mentawai	34%	28%	34%	20%	20%	27%
4	Kabupaten Padang Pariaman	29%	21%	21%	16%	10%	19%
5	Kabupaten Pasaman	21%	16%	14%	14%	12%	15%
6	Kabupaten Pesisir Selatan	17%	16%	23%	19%	14%	18%
7	Kabupaten Sijunjung	24%	24%	23%	18%	17%	21%
8	Kabupaten Solok	11%	16%	18%	11%	13%	12%
9	Kabupaten Tanah Datar	19%	16%	18%	10%	12%	15%
10	Kota Bukittinggi	20%	25%	26%	31%	14%	23%
11	Kota Padang Panjang	35%	20%	16%	10%	10%	18%
12	Kota Padang	19%	19%	21%	14%	13%	17%
13	Kota Payakumbuh	25%	21%	23%	17%	16%	20%
14	Kota Sawahlunto	24%	13%	17%	13%	14%	16%
15	Kota Solok	25%	25%	19%	6%	16%	18%
16	Kota Pariaman	24%	21%	22%	15%	11%	19%
17	Kabupaten Pasaman Barat	26%	30%	24%	18%	15%	23%
18	Kabupaten Dharmasraya	32%	26%	25%	22%	21%	25%
19	Kabupaten Solok Selatan	31%	28%	27%	16%	17%	24%
Rata-rata		24%	21%	22%	16%	14%	18%

Sumber: Hasil olah data peneliti-BPS Sumatera Barat

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa rata-rata alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat belum mencapai 30%, bahkan hanya 3 kabupaten/kota yang memiliki capaian sama dan lebih dari 30%. Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh dirjen dana perimbangan mengenai potret APBD tahun 2017 (Republika.co.id), komposisi belanja modal Kabupaten/Kota di Indonesia masih dibawah persyaratan yang ditetapkan oleh PERMENDAGRI (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tentang penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah. Peraturan Presiden

Republik Indonesia No.2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menjelaskan bahwa porsi belanja modal minimal sebesar 30% sedangkan belanja pegawai seharusnya lebih rendah dari 30%. Namun demikian, dalam kenyataannya rata-rata belanja aparatur/pegawai lebih besar dari pada belanja pemerintah daerah pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menyulitkan pemerintah daerah untuk membuat trobosan dalam meningkatkan porsi belanja modal.

Provinsi Sumatera Barat memiliki komposisi belanja modal masih di bawah 30%. Komposisi jenis belanja APBD sampai dengan tahun 2019 masih didominasi oleh belanja pegawai dengan porsi diatas 40%. Belanja modal yang identic dengan pembangunan infrastuktur justru rata-rata berada dibawah 30% dari total belanja (djp.b.kemenkeu.go.id). Persentase yang dijelaskan menandakan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat masih jauh dibawah ketentuan minimal dari alokasi belanja modal yang artinya investasi pemerintah daerah masih rendah.

Permasalahan yang juga dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah pengalokasian anggaran, dalam mengelola keuangannya diharapkan daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya, hal ini bertujuan antara lain : untuk mengupayakan pendekatan terhadap masyarakat, memudahkan masyarakat dalam melihat dan mengontrol dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah juga diharapkan untuk lebih mampu meningkatkan keuangan daerah yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan dan pembangunan daerah dengan

melihat tingkat kemandirian keuangan daerah dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan dari pusat serta memaksimalkan dana SILPA yang diperoleh dari tahun sebelumnya dan digunakan untuk tahun berikutnya.

Dalam mengelola keuangannya, pemerintah daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil daerah (Ahmad, 2021). Apabila struktur PAD kuat, maka dapat dikatakan daerah tersebut mempunyai kemampuan pembiayaan yang juga kuat sehingga dapat mewujudkan kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian daerah menjadi mampu untuk melaksanakan segala urusan pemerintahannya sendiri karena sumber – sumber pembiayaan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah. Apabila mekanisme tersebut sudah terwujud maka cita-cita kemandirian daerah dapat direalisasikan. Sumber-sumber pembiayaan yang diserahkan kepada daerah itu nantinya akan dimanifestasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat. Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari otonomi daerah. Adanya otonomi daerah ini diharapkan setiap daerah dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing.

Kemandirian keuangan daerah ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal oleh Jatitmas (2015), bertentangan dengan penelitian Gerungan dkk. (2015) menemukan kemandirian keuangan

daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Mutiah (2019) kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa semakin tinggi kemandirian keuangan daerah maka belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah akan semakin rendah, hal ini diperkirakan karena semakin banyak dana yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai dan belanja operasional, sehingga belanja modal untuk pelayanan publik relatif kecil. Arsa dan Setiawina (2015) menyatakan tidak ada pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal.

SILPA juga memiliki kontribusi dalam membiayai belanja modal, SILPA merupakan selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan (UU No. 27 Tahun 2014). SiLPA terbentuk bila terjadi surplus pada APBD dan sekaligus terjadi pembiayaan neto yang positif, dimana komponen penerimaan lebih besar dari komponen pengeluaran pembiayaan. SILPA tahun sebelumnya diharapkan mampu untuk membiayai belanja modal pada tahun berikutnya.

SiLPA dalam hubungannya dengan belanja modal telah diteliti oleh Ardhini (2011) dan Arsalya (2021) menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sejalan dengan Ardhini dan Arsalya, penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar & Siswantoro (2012) serta Marlianita & Saleh menunjukkan bahwa terdapatnya hubungan yang positif serta signifikan SiLPA terhadap belanja modal. Namun bertentangan dengan

penelitian yang dilakukan oleh (Putri et al., 2022) menunjukkan hasil dimana SiLPA berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Kondisi demikian memberikan informasi bahwa SiLPA adalah salah satu sumber pendanaan belanja modal.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu, penelitian-penelitian tersebut belum menunjukkan kekonsistenan dari hasil yang didapatkan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti kembali mengenai alokasi belanja modal dengan beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu menggunakan lebih dari 2 analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan daerah pada pemerintahan daerah serta menggunakan pengamatan tahun yang lebih lama karena pada umumnya penelitian terdahulu hanya menggunakan amatan 5 tahun.

Penelitian ini hanya berfokus pada variable kemandirian keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA. Karena 2 variabel ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah lebih mandiri dari segi keuangan dengan membandingkan pendapatan asli daerah terhadap pendapatan transfer dari pusat/provinsi serta memanfaatkan sisa anggaran tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk melihat seberapa berpengaruh pada pengalokasian belanja modal dengan demikian akan terlihat seberapa bergantungnya pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena jika tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka berdampak terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sehingga terjadi

stagnasi dalam taraf kesejahteraan masyarakat selain itu juga akan berdampak pada otonomi daerah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul, “Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Tingkat Pembiayaan Silpa Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di sumatera barat.
2. Bagaimana pengaruh tingkat pembiayaan Silpa terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di sumatera barat.
3. Bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan perumusan masalah diatas adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa :

1. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di sumatera barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pembiayaan Silpa terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera barat.

3. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak antara lain :

1. Bagi Peneliti

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan terutama yang berkaitan dengan pengaruh kemandirian keuangan daerah, dan tingkat pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di sumatera barat.

2. Bagi Riset Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam penelitian berikutnya mengenai pengaruh kemandirian keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di sumatera barat. Penelitian ini dapat dijadikan referensi yang memadai untuk penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis atau berbeda dan dapat mengembangkannya menjadi penelitian yang lebih baik.

3. Bagi Akademik

Penelitian terkait dengan pengaruh kemandirian keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah

kabupaten/kota di Sumatera Barat diharapkan akan menambah dan memperkaya hasil penelitian yang dapat dipublikasikan melalui jurnal, prosiding, buku ajar, *bookchapter* dan hak cipta serta meningkatkan citra institusi UNP.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang bagaimana pengaruh kemandirian keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan serta pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin rendah rasio kemandirian mengandung arti dimana tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat, provinsi ataupun asing semakin rendah. Dengan rendahnya rasio kemandirian daerah berarti kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatannya juga menurun termasuk kegiatan yang dibiayai melalui belanja modal. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Raja Asyuriani (2015) dan Vella Kurniasih Fitri (2013) dimana hasil penelitiannya menyatakan rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara parsial, ditemukan jika kinerja keuangan berupa rasio tingkat pembiayaan SiLPA tidak memiliki pengaruh terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Pengaruh yang tidak signifikan tersebut mengindikasikan bahwa besar kecilnya tingkat perubahan anggaran pada SiLPA tidak

menjadi alasan atas perubahan anggaran belanja modal pada tahun berjalan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar tingkat perubahan SiLPA, tidak menjadi alasan untuk memungkinkan terjadinya perubahan atas anggaran belanja modal pemerintah daerah.

3. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan, ditemukan jika variabel kemandirian keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap alokasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Adapun besaran pengaruh kemandirian keuangan daerah dan tingkat pembiayaan SiLPA yaitu sebesar 23,98% sedangkan sisanya yaitu sebesar 76,02% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti faktor gaya kepemimpinan yang meliputi program/kegiatan pemerintah daerah, faktor partisipatif anggaran, faktor dari isu-isu strategis yang ada di daerah, faktor gagal lelang, faktor penundaan pekerjaan, faktor dari pihak ketiga yang tidak melaksanakan pekerjaan, kapasitas fiskal daerah, serta masuknya anggaran belanja modal ke dalam pos belanja barang dan jasa.

B. Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian hanya mencakup data dan kondisi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat secara statistik dan informasi tertulis tentang APBD pada tahun 2016-2021.
2. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen, sehingga hasil penelitian ini belum maksimal untuk menjelaskan variasi antara variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Penelitian ini hanya menggunakan data sekunder laporan data laporan realisasi APBD yang datanya masih kurang lengkap dan sangat membatasi alur penelitian.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memilih variabel dan data lain dalam penelitian, menambah jumlah observasi penelitian, dan mengubah model regresi lain agar mendapatkan hasil yang lebih baik dari pada penelitian sebelumnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah dan menguji faktor eksternal lainnya yang diduga dapat berpengaruh terhadap perubahan anggaran belanja, seperti kondisi keuangan pemerintah, ukuran pemerintah daerah, dan lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat membuat operasionalisasi variabel lain yang lebih baik dan sesuai.
4. Bagi

peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat memodifikasi model, seperti dengan menambah variabel pemoderasi dan variabel kontrol..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2014). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Agus Widarjono, 2007. Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Kedua, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta.
- Ardhini & Sri Handayani. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal untuk Pelayanan Publik dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah). Undergraduate Thesis, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ardhini. 2011. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arif Himawan DN, Djoko Wahjudi 2014. Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta) : Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Vol. 21 No. 2, ISSN : 1412-3126.
- Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Arsa, I Ketut, dan Nyoman Djinar Setiawina. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 S.D. 2013. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 20 (2):104-111
- Arsa, I Ketut, dan Nyoman Djinar Setiawina. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali Tahun 2006 S.D. 2013. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 20 (2):104-111.

- Arsallya, M. R., Azwardi, A., & Yusnaini, Y. (2021). Analysis of factors affecting capital expenditures and their implications on government financial performance provinces in Indonesia 2011-2019. *International Journal of Research in Business and Social Science* (2147- 4478), 10(5), 95–106.
- Awan K. Z. & Akram M. (2012). The Relationship Between Islamic Work Ethics And Innovation Capability And Knowledge Sharing Plays Moderation Role. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1 (8), 34-48.
- Chen, Z., Pan, J., Wang, L., & Shen, X. (2016). Disclosure of government financial information and the cost of local government's debt financing—Empirical evidence from provincial investment bonds for urban construction. *China Journal of Accounting Research*, 9(3), 191–206. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2016.02.001>
- Ekonomika, J., Bisnis, D., Mila, S., & Sherlindah, M. (n.d.). Comparative Analysis Of Central Java And East Java Provincial Government Financial Performance. <https://journal.feb-uniss.ac.id/home>
- Masaki, T. (2018). The impact of intergovernmental transfers on local revenue generation in Sub-Saharan Africa: Evidence from Tanzania. *World Development*, 106, 173–186. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.01.026>
- Putra, A. F. S., Irwan, M., & Husnan, L. H. (2021). Determinants Of Capital Expenditure And Its Effect On Regional Financial Performance: A Study On District And City In West Nusa Tenggara Province Of Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 110(2), 65–74. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2021-02.08>
- Fakhry, Syahadat Muhammad. 2017. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Lampung.
- Felix, Ourankinse. (2012). Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation*.

- Gerungan, Sylvia Febriany., David. P.E. Saerang., dan Winston Pontoh. 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”*, 6 (1):12-29.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim Abdul. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2001. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat, Jakarta
- Halim, Abdul. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Harahap, S. S. (2007). Teori Akuntansi (Edisi Revisi). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2002. ”Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan”, Jakarta : PT Raja Grfindo Persada.
- Hendawatia, H., Komarasakti, D., Ansori, S (2018). The Effect of Capital Cost and General Allocation of Funds To The Regional Financial Independence in Bandung City Government. *THE INTERNATIONAL JOURNAL OF BUSINESS REVIEW (THE JOBS REVIEW)*, 1 (2), 2018, 141-149.
- Hendra Titisari, K., & Chomsatu, Y. (2018). Influence of Regional Financial Responsibility, Degree of Fiscal Desentralization and Level Financing Level to Allocation of Capital Government Regency / Central Java City. *KnE Social Sciences*, 3(10), 747. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.3169>

- Hidayat, Mochamad Fajar dan Ghozali Maski. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur) : Jurnal. Universitas Brawijaya.
- Imam Ghozali (2020) 25 Grand Theory, 25 Teori Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. 1st edn. Semarang: Yoga Pratama.
- Jatitmas, Rilo. 2015. Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, 11 (1):50-57.
- Kusnandar, dan Siswantoro, D. (2012). “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal.” Journal Universitas Indonesia, 1– 20.
- Mahmudi. 2016. Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2016. Analisis Lapoan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Marlianita, Yulistiani, & Suji Abdullah Saleh. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SiLPA terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat. Indonesian Accounting Research Journal, 1(1), 25–35.
- Marzuki., Bahri, H., Akhyar, C., Putri, H. (2022) The Influence Of Regional Genuine Income, Balanced Funds And Budget Return Calculations (Silpa) On Capital Expenditures In Indonesian Province. Journal of Accounting Research, Utility Finance and Digital Assets
- Mutiah. 2019. The Effect of Regional Financial Independence, Regional Financial Efficiency and Effectiveness of Regional Original Income on Capital

Expenditure (Study in the Provincial Level Regional Government in Indonesia 2013-2017). *European Journal of Business and Management*

Nasution. 2006. *Metode Penelitian Naturalistik-kualitatif*. Bandung : Tarsito.

Natan dan Setiana. 2010. Analisis Laporan Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan pada PT ASTRA International Tbk Periode 2007-2009. No.3. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*.

Nugraha, I. P., dan Dwirandra, A. A. N.B . (2016). “Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DBH pada Belanja Modal.” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(1), 284–311.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 Perubahan Atas 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007

Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Putra, F. (2017). “Pengaruh desentralisasi fiskal, luas wilayah, dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap pengalokasian belanja modal.” *Article Universitas Negeri Padang*, 1–25.

Raharjo, E. (2007). Teori Agency dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, 2, 37–46.

- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sularso, Havid, Y.E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, 1 (2):109-124
- Suwandi, 2015. Desentralisasi Fiskal dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, dan Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua, Ed.1, Cet. 1 Yogyakarta: Deepublish.
- Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Indonesia.
- Winarno, Wing Wahyu. 2009. Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EvIEWS. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.